



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLY KUSUMAWATI

2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN** 

3. NHK : 407244

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 337.500.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 232.500.000

## **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 116.700.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

2.900.000

2. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	N. T.
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp.	688.950.000
HUTANG	Rp.	141.000.000
. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	547.950.000

## Catatan:

IV.

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

